



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I L A M P U N G

INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : INST/ 11 /B.IV/HK/1998

TENTANG PEMBENTUKAN KOPERASI DALAM MENUNJANG PROGRAM DESAKU MAJU SAKAI SAMBAYAN (DMSS)

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta kelompok masyarakat tetap perdesaan di Propinsi Lampung terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok dan memasarkan hasil produksi serta mendorong perekonomian rakyat di pandang perlu untuk memperkuat dan memperluas kesempatan usaha bagi masyarakat melalui peningkatan pembinaan dan pengembangan koperasi yang ada dan pembentukan koperasi baru di perdesaan.

b. bahwa sesuai dengan Undang - Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung akan memberikan keleluasaan kepada kelompok masyarakat ekonomi strategis khususnya didesa Pogram Desaku Maju Sakai Sambayan (DMSS) dan masyarakat luas pada umumnya untuk mendirikan Koperasi sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan kegiatan usahanya.

c. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut diatas perlu dikeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor.14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 2. Undang - Undang Nomor. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 3. Undang - Undang Nomor. 10 Tahun 1992 tentang Pengembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga Sejahtera ;
 4. Undang - Undang Nomor. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor .6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ,
 6. Peraturan Pemerintah Nomor. 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahaan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi,
 7. Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah,
 8. Intruksi Presiden Nomor. 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian,

9. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor.41/KPTS /OT.201/I/1992 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Nelayan;
10. Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor. 63/KEP/M/IV/1994 tanggal 18 April 1994 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil;
11. Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor. 414/KEP/M/IX/1996 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
12. Surat Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah RI Nomor. 139/KEP/M/VII/1998 tentang Penunjukan Pejabat Yang berwenang Untuk Memberikan Pengesahaan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran dasar Koperasi Serta Pembubaran Koperasi;
13. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor. G/111.A/Bappeda/HK/1998 tentang Upaya Memantapkan Program Menghapus Kemiskinan (MPMK) Pola Program Terpadu Desaku Maju Sakai Sambayan (DMSS) Dengan Gerakan Kembali Ke Desa Di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada :**
1. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Tingkat II se Propinsi Lampung .
 2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Lampung.
 3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Lampung.
 4. Kepala Kantor Wilayah BKKBN Propinsi Lampung
 5. Kepala Dinas Lingkup Pertanian Tingkat I Propinsi Lampung.
- Untuk :**
- Pertama :** Para Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II, agar :
- a. Mendorong semangat berswadaya dan berswakarsa dalam berkoperasi bagi kelompok masyarakat ekonomi strategis dengan meningkatkan pembinaan secara terpadu terhadap koperasi yang ada dan mendirikan koperasi baru sesuai dengan kelayakan usaha dan kepentingan ekonominya;
 - b. Melaksanakan pembentukan Koperasi bagi kelompok masyarakat ekonomi strategis di desa program DMSS secara terpadu bersama instansi terkait ;
 - c. Dalam melaksanakan pembentukan Koperasi agar berpedoman pada petunjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi ini.
- Kedua :** Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah agar :
- a. Memperkuat dan memberdayakan kelembagaan Koperasi yang ada melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peran serta yang aktif dari anggotanya agar koperasi mampu berperan sebagai wadah kekuatan ekonomi rakyat yang sehat tangguh dan mandiri;

- b. Memberikan petunjuk, pengarahan dan pembinaan teknis dibidang perkoperasian kepada masyarakat dalam rangka pembentukan Koperasi bagi kelompok masyarakat ekonomi strategis berdasarkan potensi dan kelayakan ekonomi.

Ketiga : Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian, BKKBN Propinsi Lampung dan Kepala Dinas Lingkup Pertanian Tingkat I agar :

- a. Meningkatkan peran Koperasi di Propinsi Lampung dalam semua kegiatan ekonomi (Produksi dan distribusi) untuk menjamin perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha didaerah;
- b. Memberikan petunjuk, pengarahan dan pembinaan teknis organisasi terhadap kelompok tani nelayan dan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) untuk membentuk Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Melaksanakan segala ketentuan dalam instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Kelima : Dengan berlakunya Instruksi ini, maka Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : Inst/09/B.IV/HK/1997 tentang Pembentukan Kelompok Anggota, Tempat Pelayanan Koperasi dan Unit Usaha Otonom Koperasi Unit Desa dinyatakan tidak berlaku, dan selanjutnya pembinaan kelompok masyarakat ekonomi strategis dalam rangka pembentukan Koperasi di Propinsi Lampung berdasarkan Instruksi ini

Keenam : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam instruksi ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Di keluaran di : Telukbetung.
Pada tanggal : 8 Agustus 1998.

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

d t o

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah RI di Jakarta
3. Menteri Pertanian RI di Jakarta
4. Mentaskin/Kepala BKKBN di Jakarta
5. Kepala Biro Bina Perekonomian Setwilada Tk.I Lampung di Telukbetung
6. Himpunan instruksi.